

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN ASESOR KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH DI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LSP LKPP)**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Uji Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Asesor yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia di Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LSP LKPP);

c. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian Inpassing;
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LSP LKPP).

KESATU : Menetapkan Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses Uji Kompetensi terhadap Peserta Uji Kompetensi;
2. Merekomendasikan hasil Uji Kompetensi bahwa peserta Uji Kompetensi telah memenuhi bukti yang dipersyaratkan untuk dinyatakan Kompeten atau Belum Kompeten;
3. Memberikan masukan terhadap perbaikan dan pengembangan proses Uji Kompetensi;
4. Menyusun dan mengembangkan perangkat asesmen.

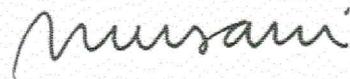
KETIGA : Kriteria Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Direktur Sertifikasi Profesi selaku Ketua LSP LKPP.

KELIMA : Kepada Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tercantum namanya diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,



DHARMA NURSANI

Tembusan :

1. Sekretaris Utama.
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
3. Ketua LSP LKPP.
4. Anggota Asesor Kompetensi.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA  
 NOMOR TAHUN 2017 TENTANG  
 PENETAPAN ASESOR KOMPETENSI  
 PENGADAAN BARANG/ JASA  
 PEMERINTAH DI LEMBAGA  
 SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/  
 JASA PEMERINTAH (LSP LKPP)

**DAFTAR NAMA ASESOR**

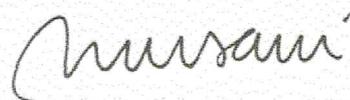
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Nomor Sertifikat</b>	<b>Nama Instansi</b>
1	Dharma Nursani	MET.000.006990 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2	Suharti	MET.000.000858 2010	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3	Dwi Wahyuni	MET.000.000856 2010	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4	Fadli Arif	MET.000.007003 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5	Sutan Suangkupon Lubis	MET.000.006988 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6	Iwan Herniwan	MET.000.007001 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7	Yulianto Prihandoyo	MET.000.006987 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8	M. Aris Supriyanto	MET.000.006989 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9	Yasip Khasani	MET.000.000325 2011	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10	Zulhenny	MET.000.000860 2010	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11	Tjipto Prasetyo Nugroho	MET.000.000855 2010	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12	Windy Dian Trisari	MET.000.000436 2013	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

13	Ari Sulindra	MET.000.000438 2013	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14	Hafiz Ashady	MET.000.003725 2013	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15	Jhon Piter Halomoan Situmorang	MET.000.006996 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
16	Raden Ari Widiyanto	MET.000.006993 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17	Ichwan Makmur Nasution	MET.000.007004 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18	Selamet Budiharto	MET.000,007002 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19	Wisnu Setyo Wijoyo	MET.000.006995 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20	Muhammad Firdaus	MET.000.002113 2016	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
21	Heldi Yudiyatna	MET.000.000336 2011	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
22	Miftah Irfaniah	MET.000.002213 2012	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
23	Ade Rizky Emirsyah	MET.000.002205 2012	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24	Harry Sri Kahartan	MET.000.000857 2010	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
25	Vina Da'watul Aropah	MET.000.001144 2013	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26	Dian Rahmayanti	MET.000.003718 2013	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
27	Umi Nuraeni	MET.000.002607 2014	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
28	Edi Kristiyanto	MET.000.006991 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
29	Fajar Adi Hemawan	MET.000.006994 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
30	Mia Adhi Paramitha	MET.000.006999 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

31	Desi Kartika	MET.000.001145 2013	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
32	Deasy Rachmawati	MET.000.000607 2013	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
33	Anastasia Citra Puspita	MET.000.000604 2013	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
34	Reflus	MET.000.000437 2013	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
35	Tri Susanto	MET.000.003724 2013	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
36	Sulmiari	MET.000.001147 2013	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
37	Sigit Apriyanto	MET.000.000340 2011	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
38	Agung Widayat	MET.000.002210 2012	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
39	Eva Nurdinna	MET.000.002206 2012	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
40	Meita Damayanti	MET.000.002608 2014	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
41	Atmojo Heri Prasetyo	MET.000.006992 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
42	Nungky Karina Putri	MET.000.006986 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
43	Siti Ulyanah	MET.000.006984 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
44	Dwi Hendri Cahyadi	MET.000.006997 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
45	Manshur Riadli	MET.000.006982 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
46	Martdetiara Dewi Kartika	MET.000.006998 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
47	Andy Purwa Sejati	MET.000.006983 2015	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
48	Adrilmen Basir	MET.000.000339 2011	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

49	Edi Tamtomo	MET.000.001152 2013	Badan Pemeriksa Keuangan
50	Nur Basuki	MET.000 000614 2013	Badiklat Prov DKI Jakarta
51	Posma Marbun	MET.000.001155 2013	Badiklat Prov DKI Jakarta
52	Cecep Fauzy Chaidir	MET.000.002214 2012	Badiklat Prov Jawa Barat
53	Herniks Jatmiati	MET.000.001159 2013	BKPPD Kab Kapuas
54	Davli	MET.000.002208 2012	BPMPPPT Kab Lima Puluh Kota
55	Isriadi Putranto	MET.000.002211 2012	Dinas PU Kab Karanganyar
56	Yuswanto	MET.000.002209 2012	IAPI DPD Jawa Timur
57	Ali Sadikin	MET.000.000603 2013	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
58	Muhammad Winarno	MET.000.000612 2013	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
59	Agung Budi Susanto	MET.000.001157 2013	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
60	Rini Septowati	MET.000.000615 2013	Pusdiklat BPKP
61	Eko Suryo Putranto	MET.000.002207 2012	Sekretariat Daerah Kab Cirebon
62	Blessmiyanda	MET.000.002204 2012	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta
63	Lusningsih	MET.000.001158 2013	ULP Pemkot Yogyakarta
64	Irawan Rumekso	MET.000.003728 2013	Badiklat Prov Jawa Tengah
65	Wahyu Kusno Wibowo	MET.000.003720 2013	Badiklat Prov Jawa Tengah
66	Setyanto Putro	MET.000.000862 2010	Universitas Tidar Magelang

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,



DHARMA NURSANI

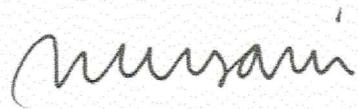
LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA  
 NOMOR TAHUN 2017 TENTANG  
 PENETAPAN ASESOR KOMPETENSI  
 KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/  
 JASA PEMERINTAH DI LEMBAGA  
 SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/  
 JASA PEMERINTAH (LSP LKPP)

**TABEL DAFTAR HONORIUUM ASESOR**

No	Bentuk Penugasan	Jumlah Asesi	Satuan Honorium (Rp)	Jumlah Jam Asesmen	Total Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Mandiri	1	750.000	4	3.000.000	Mampu menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Asesor Kompetensi
		2	750.000	6	4.500.000	
2	Tandem	1	750.000	2	1.500.000	- Proses asesmen dilakukan oleh 2 orang dan masing-masing Asesor berhak memberikan rekomendasi hasil Uji Kompetensi - Untuk pembelajaran bagi Asesor pemula dalam pemahaman skema tertentu - Untuk media penyegaran bagi Asesor yang sudah lama tidak melakukan asesmen dalam skema tertentu
		2	750.000	3	2.250.000	

3	Observer	-		1 OK	750.000	- Mengamati proses pelaksanaan uji kompetensi -Tidak dapat memberikan rekomendasi hasil uji kompetensi
---	----------	---	--	------	---------	---

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,



DHARMA NURSANI

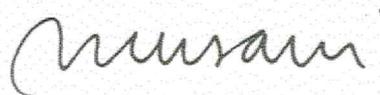
LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA  
 NOMOR TAHUN 2017 TENTANG  
 PENETAPAN ASESOR KOMPETENSI  
 PENGADAAN BARANG/ JASA  
 PEMERINTAH DI LEMBAGA  
 SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/  
 JASA PEMERINTAH (LSP LKPP)

**PERSYARATAN ASESOR KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH**

No	Klasifikasi Asesor	Persyaratan
1	Asesor untuk Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Sertifikat Asesor Kompetensi yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kompetensi atau pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>3. Memahami Skema Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;</li> <li>4. Memiliki Sertifikat Pelatihan untuk Pelatih Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Sertifikat Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pertama atau pengalaman atau ikut serta dalam pengembangan Materi Pelatihan Kompetensi atau Materi Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pertama;</li> <li>5. Memiliki Integritas;</li> <li>6. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Peserta Sertifikasi (Asesi);</li> <li>7. Memiliki kemampuan komunikasi.</li> </ol>
2	Asesor untuk Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Sertifikat Asesor yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kompetensi atau pengalaman dibidang Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>3. Memahami Skema Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;</li> <li>4. Memiliki Sertifikat Pelatihan untuk Pelatih</li> </ol>

		<p>Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Sertifikat Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Muda atau pengalaman atau ikut serta dalam pengembangan Materi Pelatihan Kompetensi atau Materi Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Muda;</p> <p>5. Memiliki Integritas ;</p> <p>6. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Peserta Sertifikasi (Asesi);</p> <p>7. Memiliki kemampuan komunikasi.</p>
3	Asesor untuk Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	<p>1. Memiliki Sertifikat Asesor yang berlaku;</p> <p>2. Memiliki kompetensi atau pengalaman dibidang Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>3. Memahami Skema Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya;</p> <p>4. Memiliki Sertifikat Pelatihan untuk Pelatih Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Sertifikat Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Madya atau pengalaman atau ikut serta dalam pengembangan Materi Pelatihan Kompetensi atau Materi Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Madya;</p> <p>5. Memiliki Integritas ;</p> <p>6. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Peserta Sertifikasi (Asesi);</p> <p>7. Memiliki kemampuan komunikasi.</p>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,



DHARMA NURSANI